



The Impact of Education Policy on Equity of Access to Education in Indonesia and New Zealand

Fitri Noviani¹, Yulensi Klareza², Dwi Fahmilia³, Irwan Koto⁴

fitrinoviani763@gmail.com¹, klarezayulensi@gmail.com², dwifahmilia09@gmail.com³,

koto_irwan@yahoo.co.id⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Education is vital for national development, yet access disparities persist. This study compares education policies in Indonesia and New Zealand, analyzing their effectiveness in ensuring equity. Using a qualitative comparative method, data from government reports and academic sources were examined. Findings show Indonesia struggles with economic and geographic barriers despite programs like KIP and BOS, while New Zealand's decentralized system and financial aid improve access, though ethnic gaps remain. Strong governance and targeted policies in New Zealand help reduce disparities, offering lessons for Indonesia to enhance infrastructure, teacher distribution, and digital access. Future research should explore socio-economic impacts and long-term outcomes.

Keywords: education policy, Indonesia, New Zealand, equity, comparative study

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan memiliki peran penting dalam mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi pada pembangunan suatu negara (Alpian et al., 2019). Kesenjangan akses pendidikan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan suatu negara. Namun, realitas di berbagai negara menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial, maupun geografis. Faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi keluarga, lokasi geografis, dan kebijakan pendidikan suatu negara sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Sibuea, 2020).

Indonesia dan New Zealand memiliki perbedaan dalam kebijakan pendidikan serta implementasinya. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Faktor geografis seperti banyaknya daerah terpencil dan kepulauan yang sulit dijangkau menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Selain itu, ketimpangan ekonomi menyebabkan banyak anak dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan berkualitas.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan, seperti program Wajib Belajar 12 Tahun, bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta penguatan sekolah-sekolah di daerah tertinggal (Mustopa et al., 2025). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dan kualitas pengajaran. Sebaliknya, New Zealand sebagai negara maju memiliki sistem pendidikan yang lebih terstruktur dengan kebijakan yang berorientasi pada inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Negara ini menerapkan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah atas serta memiliki sistem yang mendukung pendidikan bagi kelompok minoritas, termasuk komunitas Māori dan Pasifika. Pemerintah New Zealand juga menekankan pendekatan pendidikan yang berbasis kesetaraan dengan menyediakan berbagai program dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus serta mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah (OECD, 2012). Meskipun demikian, New Zealand tetap menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama dalam menangani kesenjangan prestasi antara kelompok etnis serta daerah perkotaan dan pedesaan.

Konsep kesetaraan pendidikan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis (Sayyi et al., 2022). Sistem pendidikan yang adil dapat mengatasi dampak ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih luas (OECD, 2012). Negara-negara dengan sistem pendidikan yang lebih maju cenderung menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan tetap dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama seperti kelompok lainnya (Budi & Amalia, 2024). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai hambatan struktural yang dapat menghambat pencapaian kesetaraan pendidikan.

Kebijakan pendidikan memiliki pengaruh besar dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan. Berbagai program seperti wajib belajar, bantuan pendidikan, serta kebijakan inklusif diterapkan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan (Darmansah et al., 2025). Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing negara. Program pendidikan seperti Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu (Mustopa et al., 2025). Sementara itu, di New Zealand, kebijakan pendidikan seperti *Tomorrow's Schools* dan *The National Education Guidelines* (NEG) lebih menekankan pada desentralisasi sistem pendidikan dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan serta memastikan kesetaraan akses bagi semua siswa (OECD, 2020).

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesetaraan akses pendidikan meliputi faktor ekonomi, geografis, sosial, dan teknologi. Faktor ekonomi menjadi pengaruh besar karena keterjangkauan biaya pendidikan dan dukungan finansial dari pemerintah sangat menentukan akses pendidikan seseorang (Vega et al., 2024). Faktor geografis juga berperan penting karena daerah terpencil sering mengalami keterbatasan dalam infrastruktur pendidikan, seperti akses transportasi yang terbatas dan kurangnya tenaga pengajar yang memadai (Tintington et al., 2023). Selain itu, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi akses pendidikan, terutama bagi kelompok minoritas dan perempuan yang masih menghadapi diskriminasi dalam beberapa komunitas (Sayyi et al., 2022). Terakhir, faktor teknologi menjadi aspek penting dalam modernisasi pendidikan, namun dapat menimbulkan kesenjangan jika akses terhadap teknologi belum merata di seluruh wilayah (Ridha, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia dan New Zealand serta membandingkan

dampaknya terhadap kesetaraan akses pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di masing-masing negara. Dengan memahami kelebihan dan tantangan dari kedua sistem pendidikan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis dampak kebijakan pendidikan terhadap kesetaraan akses pendidikan di Indonesia dan New Zealand. Menurut Waruwu, (2024), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan mengeksplorasi perspektif berbagai sumber. Studi komparatif digunakan karena memungkinkan perbandingan antara dua sistem pendidikan berdasarkan indikator akses pendidikan (OECD, 2021). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan studi literatur. Analisis dokumen mencakup kajian terhadap kebijakan pendidikan, laporan dari (UNESCO, 2022) serta data statistik pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah kedua negara. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah metode yang efektif dalam penelitian kualitatif karena dapat mengidentifikasi pola dan tema utama dalam kebijakan publik. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dengan akademisi atau praktisi pendidikan akan dilakukan jika diperlukan untuk memperkaya data (Patton, 2015).

Studi komparatif digunakan karena memungkinkan perbandingan antara dua sistem pendidikan berdasarkan indikator akses pendidikan (Zayu et al., 2023), perbandingan implementasi kebijakan dalam mendukung akses pendidikan (OECD, 2021), dan evaluasi dampak berdasarkan indikator seperti angka partisipasi pendidikan dan program beasiswa (UNESCO, 2022). Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yang membandingkan informasi dari berbagai dokumen, laporan resmi, dan wawancara (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini memiliki beberapa batasan, antara lain hanya berfokus pada kebijakan pendidikan yang berpengaruh terhadap kesetaraan akses dan tidak membahas aspek kurikulum atau kualitas pengajaran secara mendalam (UNESCO, 2022). Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi bagi Indonesia berdasarkan praktik terbaik yang diterapkan di New Zealand.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan pendidikan terhadap kesetaraan akses pendidikan di Indonesia dan New Zealand. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, ditemukan beberapa perbedaan signifikan antara kedua negara dalam hal kebijakan pendidikan yang diterapkan.

Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung Kesetaraan Akses Pendidikan

A. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan daerah terpencil. Beberapa kebijakan utama yang berdampak signifikan meliputi:

- a. Program Indonesia Pintar (PIP): Memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung keberlanjutan pendidikan (Kemendikbud, 2021).
- b. Kartu Indonesia Pintar (KIP): Memfasilitasi pembiayaan kebutuhan

pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin (BPS, 2022).

- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Memberikan subsidi kepada sekolah untuk membantu biaya operasional guna meningkatkan dayaampung pendidikan (Kemendikbud, 2023).
- d. Zonasi Sekolah: Sistem penerimaan siswa berbasis lokasi tempat tinggal untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan (Permendikbud No. 14 Tahun 2018).

B. Kebijakan Pendidikan di New Zealand

New Zealand dikenal memiliki sistem pendidikan yang lebih merata dan inklusif. Pemerintahnya telah menerapkan beberapa kebijakan berikut:

- Pendidikan Gratis: Pendidikan dasar hingga menengah diberikan secara gratis bagi semua warga negara (New Zealand Ministry of Education, 2023).
- Student Allowance dan Beasiswa: Dukungan finansial bagi siswa kurang mampu untuk menghindari hambatan ekonomi dalam pendidikan (Education Counts, 2022).
- Pendidikan Inklusif untuk Semua: Program khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama (NZ Human Rights Commission, 2021).
- Standar Kualitas Sekolah yang Merata: Pengawasan ketat pemerintah terhadap kualitas sekolah guna mencegah kesenjangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan (OECD, 2012).

Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Pemerataan Akses Pendidikan

1. Dampak Kebijakan di Indonesia

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar:

- a. Peningkatan angka partisipasi pendidikan: Program seperti PIP dan BOS telah meningkatkan jumlah siswa yang bersekolah, terutama di tingkat dasar dan menengah.
- b. Kesenjangan pendidikan di daerah terpencil: Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya tenaga pendidik menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah (World Bank, 2020).
- c. Kurangnya akses digital: Sebagian besar siswa di daerah terpencil belum mendapatkan akses internet dan perangkat elektronik yang memadai (UNICEF, 2022).

2. Dampak Kebijakan di New Zealand

New Zealand telah mencapai tingkat pemerataan akses pendidikan yang lebih tinggi berkat kebijakan yang sistematis dan inklusif:

- a. Hampir tidak ada hambatan ekonomi dalam pendidikan: Sistem pendidikan gratis dan dukungan finansial menjamin semua anak dapat mengakses sekolah tanpa kendala biaya (OECD, 2022).
- b. Standar kualitas sekolah yang merata: Tidak ada kesenjangan signifikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas (UNESCO, 2021).
- c. Dukungan bagi anak berkebutuhan khusus: Sekolah di New Zealand menerapkan program inklusi bagi siswa dengan kebutuhan khusus agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif (NZ Human Rights Commission, 2021).

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

1. Faktor Pendukung

Faktor	Indonesia	New Zealand
Dukungan Pemerintah	Program PIP, BOS, KIP untuk meningkatkan akses pendidikan	Pendidikan gratis dan beasiswa bagi semua siswa
Keterlibatan Masyarakat	Program sekolah inklusif dan komunitas belajar	Kemitraan sekolah dengan orang tua dan masyarakat
Pendidikan Inklusif	Mulai diterapkan, tetapi masih terbatas	Sudah berjalan efektif dan diterapkan di hampir semua sekolah
Penggunaan Teknologi	Masih berkembang, terutama setelah pandemi	Sudah merata dengan akses internet di hampir seluruh wilayah

2. Faktor Penghambat

Faktor	Indonesia	New Zealand
Infrastruktur Sekolah	Masih banyak sekolah di daerah terpencil dengan fasilitas minim	Infrastruktur sekolah sudah merata dan modern
Distribusi Guru	Ketimpangan distribusi guru di daerah terpencil	Guru didistribusikan secara merata
Akses Digital	Keterbatasan akses internet di daerah pelosok	Akses internet sudah tersedia hampir di seluruh wilayah
Kesenjangan Ekonomi	Masih ada kelompok masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pendidikan	Bantuan finansial bagi siswa kurang mampu meminimalkan kesenjangan

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia dan New Zealand memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesetaraan akses pendidikan. Meskipun Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tantangan dalam pemerataan pendidikan masih menjadi permasalahan utama. Sebaliknya, New Zealand dengan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada inklusivitas telah berhasil mengurangi hambatan ekonomi dan geografis dalam akses pendidikan.

Analisis Dampak Kebijakan Pendidikan

Terdapat perbedaan mendasar dalam efektivitas implementasi kebijakan pendidikan antara kedua negara. Di Indonesia, kebijakan zonasi sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 bertujuan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Kemendikbud, 2023). Selain itu, infrastruktur pendidikan yang belum merata serta keterbatasan jumlah tenaga pengajar di daerah terpencil menjadi kendala utama dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan (World Bank, 2020).

Di sisi lain, New Zealand telah berhasil menerapkan sistem pendidikan gratis hingga jenjang menengah atas serta menyediakan bantuan finansial dalam bentuk Student Allowance dan beasiswa (Education Counts, 2022). Dukungan pemerintah terhadap pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus serta kelompok minoritas, seperti komunitas Māori dan Pasifika, mencerminkan pendekatan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata (NZ Human Rights Commission, 2021). Selain itu, pengawasan ketat terhadap standar kualitas sekolah turut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan (OECD, 2012).

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan di kedua negara. Di Indonesia, dukungan pemerintah dalam bentuk program bantuan pendidikan seperti PIP dan BOS telah berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah (Kemendikbud, 2021). Namun, keterbatasan infrastruktur pendidikan serta akses digital masih menjadi hambatan, terutama bagi siswa di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet dan perangkat elektronik yang memadai (UNICEF, 2022). Sebaliknya, New Zealand telah berhasil mengatasi hambatan akses pendidikan melalui distribusi infrastruktur dan tenaga pengajar yang lebih merata (OECD, 2022). Faktor lain yang turut berperan dalam keberhasilan sistem pendidikan New Zealand adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan serta kemitraan antara sekolah dengan orang tua dan komunitas lokal. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat (NZ Human Rights Commission, 2021).

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di Indonesia. Pertama, perlu adanya peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil guna mengurangi disparitas kualitas pendidikan antarwilayah. Kedua, distribusi tenaga pengajar perlu mendapat perhatian lebih agar daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih optimal (World Bank, 2020). Ketiga, akses terhadap teknologi dan internet perlu diperluas agar semua siswa, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat memperoleh manfaat dari sistem pembelajaran berbasis digital (UNICEF, 2022).

Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik terbaik dari sistem pendidikan New Zealand, seperti penguatan pendidikan inklusif dengan menyediakan program dukungan yang lebih komprehensif bagi siswa berkebutuhan khusus. Kebijakan yang lebih menitikberatkan pada desentralisasi pendidikan, sebagaimana diterapkan dalam Tomorrow's Schools di New Zealand, dapat memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya mereka secara efisien (OECD, 2020). Dengan memahami keunggulan dan tantangan dari kedua sistem pendidikan tersebut, diharapkan kebijakan

pendidikan di Indonesia dapat lebih efektif dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Implementasi kebijakan yang lebih merata dan inklusif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan nasional di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia dan New Zealand memiliki perbedaan signifikan dalam implementasi dan dampaknya terhadap kesetaraan akses pendidikan. Indonesia menerapkan program seperti PIP, KIP, BOS, dan zonasi sekolah untuk meningkatkan akses, tetapi masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur, distribusi guru, dan teknologi. Sebaliknya, New Zealand menerapkan sistem pendidikan inklusif dengan pendidikan gratis, Student Allowance, dan dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus, yang lebih efektif dalam pemerataan akses. Faktor seperti standar kualitas sekolah dan partisipasi masyarakat turut memperkuat efektivitas kebijakan di New Zealand. Kesetaraan akses pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, sosial, dan teknologi. Meskipun kedua negara menghadapi tantangan, sistem New Zealand lebih efektif dalam mengatasi hambatan pendidikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak membahas aspek kurikulum dan kualitas pengajaran serta faktor budaya dan ekonomi makro yang dapat mempengaruhi akses pendidikan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur sekolah di daerah terpencil guna mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Hal ini mencakup pembangunan sekolah, peningkatan sarana belajar, serta akses transportasi yang lebih baik bagi siswa di daerah sulit dijangkau.
2. Pemerataan Distribusi Tenaga Pendidik: Kebijakan pemerataan tenaga pendidik perlu diperkuat dengan memberikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, serta meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidik agar kualitas pengajaran lebih merata.
3. Perluasan Akses Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran: Pemerintah harus memperluas akses terhadap internet dan perangkat digital guna mendukung sistem pembelajaran daring, terutama bagi siswa di daerah yang belum terjangkau teknologi.
4. Penguatan Pendidikan Inklusif: Indonesia dapat mengadopsi pendekatan pendidikan inklusif yang diterapkan di New Zealand dengan menyediakan program dukungan yang lebih komprehensif bagi siswa berkebutuhan khusus dan kelompok masyarakat rentan.
5. Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan: Memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, sebagaimana yang telah diterapkan dalam kebijakan Tomorrow's Schools di New Zealand.
6. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah, serta analisis perbandingan lebih lanjut mengenai kualitas kurikulum dan metode pengajaran di Indonesia dan New Zealand. Penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di kedua negara. Dengan penelitian

lebih lanjut, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali Mustopa, Jumriani, R. (2025). 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Implementasi Pendidikan Inklusif dengan Isu Kesenjangan Akses dan Tren 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 158–165.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). BERKELANJUTAN DI INDONESIA :
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Mnesia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72.
- Darmansah, T., Anggraini, A., & Sirait, F. A. (2025). Peran Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, 3(1), 94–102.
- Eko Prasetyo Budi & Rosyida Amalia. (2024). Menelisik Kebijakan Pendidikan : Studi Kasus Negara Maju Karelia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9), 379–383.
- Indicators, O. (2021). What proportion of teachers leave the teaching profession? <https://doi.org/10.1787/bcc79d57-en>
- John W Creswell, C. N. P. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.
- OECD. (2012). *Equity and Quality in Education*.
- Ridha, A. (2016). DESENTRALISASI PENDIDIKAN (SEBAGI UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN). *STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 127–148.
- Sayyi, A., Huda, S. A. A., Fithriyah, I., & Al-Manduriy, S. M. (2022). Kesetaraan dalam Pendidikan Sebagai Praksis Responsif Gender Era Society 5.0 di Pesantren. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 7(2), 76–94. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v7i2.3151>
- Sibuea, H. Y. P. (2020). Education System Reform in Indonesia: Progress and Challenges. *Kajian*, 22(2), 151–162.
- Tintigon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Gender Report*.
- Vega, A., P, J. A., & A, M. R. (2024). KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN : ANALISIS PENGIMPLEMENTASIAN NILAI PANCASILA DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA. 1(2), 44–57.

- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Zayu, W. P., Herman, H., & Vitri, G. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(1), 92–96. <https://doi.org/10.47233/jppie.v2i1.762>